

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility / CSR*) merupakan sebuah gagasan yang semakin berkembang dan mendapat perhatian dari kalangan dunia usaha, pemerintah, serta masyarakat. Perusahaan dituntut untuk mempertanggungjawabkan dampak dari aktivitas bisnis perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pemerintah Indonesia juga turut mendorong pengungkapan laporan tanggung jawab sosial perusahaan dengan adanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam UU PT, konsep tanggung jawab sosial perusahaan disebut dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas, tujuan dari TJSL adalah mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Berdasarkan tujuan TJSL menurut PP RI ini, TJSL merupakan suatu hal yang diperlukan bagi kepentingan negara, masyarakat, serta perusahaan itu sendiri.

Pengungkapan laporan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan teori legitimasi. Dalam teori legitimasi, perusahaan

memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai keadilan, dan perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga bergantung pada hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan tersebut menjalankan setiap aktivitasnya. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat (Handriyani, 2013).

Saat ini, pengungkapan TJSI perusahaan di Indonesia diatur oleh Pedoman Pelaporan Keberlanjutan Generasi ke 4 atau disingkat G4. Pedoman Pelaporan G4 ini merupakan hasil kolaborasi *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR) yang merupakan pedoman pelaporan TJSI untuk kawasan Asia Tenggara. G4 dirancang agar dapat diterapkan secara universal untuk semua organisasi, baik besar maupun kecil. Pedoman Pelaporan Keberlanjutan GRI G4 mencakup prinsip-prinsip pelaporan, pengungkapan standar, dan panduan penerapan untuk penyusunan laporan keberlanjutan oleh organisasi, apa pun ukuran, sektor, atau lokasinya.

Pedoman G4 dikembangkan sesuai dengan dokumen yang terkait pelaporan yang telah diakui secara internasional. Pedoman ini menawarkan dua opsi bagi organisasi untuk menyusun laporan keberlanjutan, yaitu opsi inti dan opsi komprehensif. Opsi inti berisi elemen esensial dari laporan keberlanjutan. Opsi inti berisi latar belakang yang melandasi pengungkapan organisasi mengenai dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan kinerja tata kelola. Opsi komprehensif didasarkan pada opsi inti dengan mewajibkan pengungkapan standar tambahan mengenai strategi dan analisis, tata kelola, etika, dan integritas organisasi. Selain itu, organisasi diminta untuk

menyampaikan kinerjanya secara lebih luas dengan melaporkan semua indikator yang terkait dengan aspek material yang teridentifikasi.

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap 10 laporan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia pada tahun 2015, terdapat 6 perusahaan (PT Aneka Tambang, PT Astra Internasional, PT Jasa Marga, PT Indocement, PT Bukit Asam dan PT Wijaya Karya) yang melakukan pengungkapan berdasar pada Pendoman G4 opsi inti. Sebaliknya, 4 perusahaan lainnya (PT Indofood, PT Unilever, PT Adhi Karya, dan PT Telkom Indonesia) tidak mengungkapkan laporan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial mereka sesuai dengan pendoman G4. Berdasarkan pengamatan terhadap 10 laporan keberlanjutan tersebut, tidak ada satupun perusahaan yang menggunakan opsi komprehensif (opsi dengan pengungkapan yang paling luas).

Ketidakteragaman penggunaan pedoman pelaporan keberlanjutan ini mengakibatkan komparabilitas laporan yang rendah. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kualitas laporan menurut GRI (2013) yaitu, keseimbangan, komparabilitas, akurasi, ketepatan waktu, kejelasan, dan keandalan. Penelitian Cheng dan Christiawan (2011) menyatakan bahwa pengungkapan TJSI berpengaruh terhadap *abnormal return* yang menandakan bahwa investor mempertimbangkan pengungkapan TJSI untuk membuat keputusan. Kualitas komparabilitas yang rendah ini akan menyulitkan pemegang saham dalam menilai kualitas laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang nantinya dapat berpengaruh dalam pembuatan keputusan investasi.

Ketidakteragaman penggunaan pedoman pelaporan keberlanjutan ini dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk bertindak oportunistik. Penelitian Suyono, Farooque, dan Wardani (2014) menyatakan bahwa TJSI digunakan oleh manajer perusahaan untuk mengejar kepentingan pribadi mereka.

Berdasarkan teori agensi, konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi (Jensen dan Meckling, 1976). Hal ini dapat membuat manajer termotivasi untuk menghubungkan perilaku oportunistik dengan pengungkapan TJSL. Pengungkapan TJSL seharusnya berguna bagi perusahaan, keberlangsungan lingkungan, dan juga para pemangku kepentingan namun apabila pengungkapan TJSL ini terkait dengan manajemen laba, informasi pengungkapan TJSL menjadi tidak relevan bagi pemegang saham.

Dalam rangka menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajemen, perusahaan menggunakan mekanisme pengawasan, seperti tata kelola perusahaan. Praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsekuensi logis dari struktur tata kelola perusahaan yang prinsipnya, antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan pemegang sahamnya, sesuai dengan aturan yang ada, dan menjalin kerja sama yang aktif dengan pemegang saham demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Pasaribu, Kowanda, dan Kurniawan, 2015). Tujuan perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidup jangka panjang dapat dicapai dengan pengungkapan TJSL yang merupakan usaha pertanggung jawaban perusahaan untuk menjaga lingkungan serta memenuhi ekspektasi dari pemangku kepentingan.

Berdasarkan pedoman tata kelola perusahaan (KNKG, 2006), salah satu tujuan tata kelola perusahaan adalah mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik dapat memberikan jaminan kepada semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal mengenai keberlanjutan usaha yang penting bagi

keberlanjutan perusahaan. Secara prinsip, tata kelola perusahaan dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek struktur kepemilikan dan aspek mekanisme tata kelola perusahaan (Hadiprajitno, 2011).

Struktur kepemilikan adalah salah satu aspek tata kelola perusahaan yang dipandang sebagai alat kontrol yang tepat untuk mengurangi konflik keagenan karena dapat meningkatkan proses pengawasan dalam perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan adalah kebijakan, pedoman, dan kontrol untuk mengelola organisasi dan mengurangi inefisiensi. Mekanisme tata kelola dapat mendorong pengelola perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan hal ini diungkapkan dalam laporan tahunan. Dengan demikian, perusahaan dapat memenuhi prinsip akuntabilitas kepada pemegang saham dan pemangku kepentingannya.

Dalam penelitian ini, variabel struktur kepemilikan yang digunakan merupakan kepemilikan institusional dan kepemilikan asing. Penelitian Rustiarini (2011) menggunakan tiga macam variabel yang mewakili variabel struktur kepemilikan, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing. Kepemilikan manajerial tidak digunakan dalam penelitian ini karena banyaknya hasil penelitian di Indonesia yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak memengaruhi pengungkapan TJSJL (Rustiarini, 2011; Utami dan Prastiti, 2011; Mulia dan Mutmainah, 2009). Hal ini dikarenakan jumlah kepemilikan saham manajerial pada perusahaan di Indonesia relatif kecil sehingga manajemen tidak memiliki wewenang penuh untuk memengaruhi pengungkapan TJSJL (Rustiarini, 2011; Utami dan Prastiti, 2011; Mulia dan Mutmainah, 2009)

Variabel mekanisme tata kelola perusahaan yang diangkat dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Suyono dkk. (2014), yaitu komite audit,

dewan direksi, dan dewan komisaris independen. Variabel-variabel tersebut di gunakan dalam penelitian ini karena hasil penelitian sebelumnya belum mendapatkan hasil yang konsisten. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan pengujian kembali terhadap variabel-variabel tersebut.

Faktor lainnya yang dapat memengaruhi pengungkapan laporan tanggung jawab sosial perusahaan adalah auditor eksternal. Menurut Barakat, Perez, dan Ariza (2015), auditor eksternal perusahaan dapat memiliki dampak pada kuantitas dan kualitas dari data finansial dan non finansial. KAP internasional membutuhkan lebih banyak informasi karena mereka mengikuti prosedur internal dan aspek pengendalian yang dibutuhkan oleh standar audit internasional. Penelitian Barakat dkk. (2015) menemukan adanya pengaruh antara auditor eksternal perusahaan dan pengungkapan laporan tanggung jawab sosial

Adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan perusahaan oleh pemegang saham dan pengendalian oleh manajemen dapat menimbulkan masalah agensi. Masalah agensi ini dapat terjadi ketika pihak manajemen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan sehingga menyebabkan asimetri informasi. Kepentingan manajemen dapat menyebabkan terjadinya manipulasi laporan keuangan yang dapat terjadi, salah satunya dengan adanya praktik manajemen laba. Menurut Pasaribu dkk. (2015), perusahaan yang melakukan manajemen laba lebih tertutup kepada pemangku kepentingan mengenai informasi perusahaan baik keuangan maupun non keuangan. Hal ini menyebabkan perusahaan yang melakukan manajemen laba akan mengurangi informasi yang diungkap oleh perusahaan salah satunya, yaitu mengurangi pengungkapan laporan TJSL. Hasil penelitian Gras-gil, Manzano, dan Fernandez (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih berkomitmen terhadap TJSL lebih jarang terlibat

dengan manajemen laba. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian Muttakin, Khan, dan Azim (2015) yang menyatakan bahwa manajer yang terlibat dalam pengungkapan TJSI dapat mencoba untuk menutupi akibat dari perilaku oportunistik mereka dengan membuat pengungkapan aktivitas TJSI yang lebih banyak. Hal ini terjadi pada kasus perusahaan Enron. Berdasarkan Kim, Park, dan Wier (2012), Enron merupakan perusahaan yang secara giat melakukan aktivitas TJSI namun perusahaan ini terkena skandal manipulasi laba terbesar dalam sejarah Amerika Serikat pada tahun 2000.

Istilah TJSI di Indonesia mulai dikenal pada sekitar tahun 1990. Istilah ini semakin populer setelah tahun 2007, tepatnya saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang kewajiban Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Menurut *National Center for Sustainability Reporting* (2014), dari hanya 1 perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan di tahun 2005, kini setelah satu dasawarsa, Indonesia menjadi negara terdepan dan terbanyak di ASEAN dengan 60 perusahaan yang telah membuat Laporan Keberlanjutan atau laporan TJSI.

Seiring dengan adanya fakta bahwa terjadi peningkatan pengungkapan TJSI di Indonesia, penelitian Enomoto, Kimura, dan Yamaguchi (2015) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat manajemen laba yang tinggi. Penelitian Enomoto dkk. (2015) ini merupakan studi komparatif internasional tentang manajemen laba dan proteksi investor dengan sampel 38 negara, yang meliputi periode pengamatan dari tahun 1991 sampai tahun 2010. Dalam penelitian ini Indonesia termasuk sebagai sampel. Tujuan penelitiannya adalah untuk memberikan bukti empiris adanya perbedaan manajemen laba di berbagai negara, dan perbedaan tersebut

dikarenakan adanya perbedaan proteksi terhadap investor. Berdasarkan pada nilai rata-rata skor manajemen laba, Indonesia berada pada urutan ke 8 dari 38 negara. Artinya, Indonesia berada pada tingkat tinggi manajemen laba, sedangkan tingkat terendah manajemen laba adalah Australia. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN yang ikut terpilih sebagai sampel, yaitu: Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand, Indonesia adalah yang paling besar tingkat manajemen labanya. Cai, Rahman, dan Courtenay (2008) yang membandingkan manajemen laba 32 negara pada tahun 2000 sampai 2006 juga menemukan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan manajemen laba tertinggi. Hal ini merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti.

Penelitian ini menggabungkan tiga penelitian. Penelitian pertama adalah penelitian Suyono dkk. (2014) yang menguji pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan TJSI dengan variabel manajemen laba sebagai variabel mediasi. Penelitian kedua adalah penelitian Rustiarini (2011) yang meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikan saham terhadap pengungkapan TJSI. Penelitian ketiga adalah penelitian Barakat dkk. (2015) yang menguji hubungan antara auditor eksternal perusahaan dan pengungkapan TJSI. Peneliti menggabungkan ketiga penelitian ini karena ketiga variabel independen yang diuji belum mendapatkan hasil yang konsisten dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian Suyono dkk. (2014) menyatakan bahwa manajemen laba tidak memediasi pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan TJSI. Berdasarkan Sekaran dan Bougie (2013:75), variabel mediasi memiliki peran untuk membentuk suatu proses serta membantu untuk menkonseptualisasi dan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Peran variabel mediasi ini berkebalikan dengan peran



variabel manajemen laba dalam penelitian ini yang dapat mengubah hubungan mekanisme tata kelola perusahaan dan pengungkapan TJSI. Hal ini mengakibatkan variabel manajemen laba lebih sesuai menjadi variabel moderasi. Berdasarkan Sekaran dan Bougie (2013:71), variabel moderasi adalah variabel yang memiliki efek kontingensi yang kuat pada hubungan variabel independen dan dependen. Selain itu, sepengetahuan peneliti, belum terdapat penelitian yang menguji pengaruh moderasi dari manajemen laba pada pengungkapan TJSI di Indonesia sehingga masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut.

## **1.2. Motivasi Penelitian**

Peneliti termotivasi untuk menganalisis pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan karena terdapat banyak penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan TJSI namun hasil penelitian masih tidak konsisten. Isu ini penting dan perlu untuk diteliti karena apabila manajer yang terlibat dalam praktik TJSI berdasar pada insentif oportunistik, praktik ini dapat merugikan pemegang saham. Selain itu, tujuan utama dari praktik TJSI yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat, masyarakat maupun Perseroan itu sendiri menjadi tidak tercapai apabila praktik TJSI disertai dengan adanya praktik manajemen laba yang tinggi. Pengungkapan TJSI oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tidak dilandasi oleh pendoman yang sama juga akan mengakibatkan komparabilitas yang rendah sehingga mengurangi nilai guna pengungkapan TJSI dalam proses pengambilan keputusan oleh pemegang saham.

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian, hasil penelitian mengenai pengungkapan TJSI belum mendapatkan hasil yang konsisten. Penelitian Suyono dkk. (2015) menyebutkan bahwa tidak terdapat

pengaruh proksi mekanisme tata kelola perusahaan (komite audit, dewan direksi dan dewan komisaris independen) terhadap pengungkapan TJSL, kecuali dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan TJSL. Penelitian Barakat dkk. (2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dewan direksi dan komite audit terhadap pengungkapan TJSL. Penelitian Nussy (2012) juga menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan TJSL.

Penelitian Rustiarini (2011) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan TJSL, tetapi kepemilikan asing memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL. Hal ini berkebalikan dengan hasil penelitian Said, Zainuddin, dan Haron (2009) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak memengaruhi pengungkapan TJSL. Selain itu, penelitian Fitri (2014) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL.

Penelitian Barakat dkk. (2015) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif karakteristik auditor eksternal terhadap pengungkapan TJSL. Hasil penelitian mereka bertentangan dengan hasil penelitian Soliman (2013) yang menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela. Penelitian Soliman (2013) menyatakan bahwa auditor eksternal tidak berpengaruh terhadap pengungkapan TJSL perusahaan.

Selain itu, penelitian Pasaribu dkk. (2015) juga menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian Muttakin dkk. (2015) menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitian mereka menemukan bahwa manajer di negara

berkembang melakukan manajemen laba ketika mereka menyediakan pengungkapan laporan tanggung jawab sosial yang lebih banyak.

Penelitian Suyono dkk. (2014) adalah penelitian pertama di Indonesia yang menguji pengaruh mediasi dari manajemen laba pada pengungkapan TJSL. Hasil penelitian Suyono dkk. (2014) menyebutkan bahwa manajemen laba tidak memediasi pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan TJSL. Pada perumusan hipotesis dijelaskan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL. Namun dengan adanya variabel manajemen laba sebagai pemediasi, mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan TJSL. Keberadaan variabel manajemen laba mengubah hubungan asli dari variabel independen dan variabel dependen sehingga variabel manajemen laba dianggap lebih sesuai sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini manajemen laba berperan sebagai variabel pemoderasi.

Selain itu, pengukuran variabel manajemen laba dalam penelitian terdahulu banyak menggunakan metode pengukuran *Modified Jones Model* (Suyono dkk., 2014; Pasaribu dkk., 2015; Mutakkin dkk., 2015). Hal ini berkebalikan dengan hasil beberapa penelitian (Thomas dan Zang, 2000; Yasa, 2007; Joni dan Hartono, 2008) yang membuktikan bahwa penggunaan model Kang dan Sivaramakrishnan merupakan metode pengukuran yang lebih baik untuk mendeteksi manajemen laba. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk menggunakan model ini sebagai alat pengukuran variabel moderasi manajemen laba. Untuk mengukur variabel pengungkapan TJSL, peneliti menggunakan pendoman GRI-G4 yang merupakan pendoman pengungkapan TJSL yang terbaru. Penilaian setiap item menggunakan sistem pembobotan sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat diketahui bahwa permasalahan manajemen adalah pengungkapan TJSJ yang terkait dengan perilaku oportunistik manajer dapat merugikan pemegang saham dan menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, pihak manajemen perlu mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi pengungkapan TJSJ dan apakah manajemen laba merupakan faktor kontingensi yang terkait dengan pengungkapan TJSJ perusahaan. Berdasarkan pertanyaan manajemen tersebut, dirumuskan pertanyaan-pertanyaan riset sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
2. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
3. Apakah auditor eksternal berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
4. Apakah manajemen laba memperlemah pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
5. Apakah manajemen laba memperlemah pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
6. Apakah manajemen laba memperlemah pengaruh auditor eksternal terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki 6 tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Menguji pengaruh auditor eksternal terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Menguji pengaruh manajemen laba dalam memperlemah mekanisme tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
5. Menguji pengaruh manajemen laba dalam memperlemah struktur kepemilikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
6. Menguji pengaruh manajemen laba dalam memperlemah auditor eksternal terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

#### **1.5. Kontribusi Penelitian**

Terdapat tiga aspek kontribusi penelitian dalam studi ini, yaitu kontribusi teori, kontribusi praktik, dan kontribusi kebijakan.

##### **1.5.1 Kontribusi Teori**

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dan tambahan bukti empiris dalam penerapan teori agensi (*agency theory*) khususnya biaya agensi (*agency cost*). Biaya agensi adalah biaya bagi prinsipal (pemegang saham) untuk melakukan pengawasan terhadap agen (manajer). Hasil pengujian efek moderasi menemukan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan, dan keberadaan KAP Big Four tidak berperan sebagai mekanisme yang dapat mencegah atau mengurangi praktik manajemen laba di perusahaan. Selain itu, hasil penelitian memberikan tambahan bukti empiris hipotesis asimetri informasi pada teori agensi. Hal ini dibuktikan dengan temuan bahwa struktur kepemilikan (kepemilikan institusional dan kepemilikan asing) tidak memengaruhi praktik manajemen laba karena manajer berada

pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham.

### 1.5.2 Kontribusi Praktik

Hasil penelitian menemukan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan dan auditor eksternal tidak memengaruhi pengungkapan TJSL. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan agar mempertimbangkan faktor pengalaman, kompetensi, dan tingkat keperdulian terhadap masalah sosial dan lingkungan dalam pemilihan komite audit, dewan direksi, dan dewan komisaris independen sehingga dapat meningkatkan relevansi informasi pengungkapan TJSL perusahaan. Selain itu, pelatihan dan pendidikan mengenai kebijakan terbaru pelaporan TJSL juga merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan TJSL perusahaan. *The National Center for Sustainability Reporting (NCSR)* bekerjasama dengan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) menawarkan program *Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS)* yang dapat memberikan informasi mengenai berbagai aspek dari jaminan keterlibatan yang berhubungan dengan pelaporan berkelanjutan, meliputi teknik dan metode audit yang diakui.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa keberadaan kepemilikan institusional dan kepemilikan asing tidak berperan untuk mengurangi manajemen laba karena tekanan terhadap manajer untuk memenuhi ekspektasi laba jangka pendek semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya tidak hanya mengandalkan struktur kepemilikan sebagai satu-satunya sistem pengawasan bagi manajemen. Namun, hasil penelitian menemukan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan asing dapat meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

### 1.5.3 Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan, dan auditor eksternal tidak berperan dalam mengurangi manajemen laba. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi regulator untuk memperkuat regulasi mengenai tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan. Hal ini perlu dilakukan agar mekanisme tata kelola perusahaan dapat lebih efektif dalam mengawasi manajer sehingga laporan keuangan menjadi lebih reliabel. Selain itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2015) paragraf 14 menyatakan bahwa pengungkapan TJSI masih bersifat sukarela dan belum diatur di dalam SAK sehingga penelitian ini dapat memberikan masukan bagi IAI mengenai pentingnya peraturan pengungkapan TJSI perusahaan.